

2015

Partai dan Patron: Riwayat PSII Melalui Gejolak Zaman

Carolus Bregas Pranoto

UI Liberalism and Democracy Study Club, cbregaspranoto@outlook.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Political History Commons](#)

Recommended Citation

Pranoto, Carolus Bregas (2015) "Partai dan Patron: Riwayat PSII Melalui Gejolak Zaman," *Jurnal Politik*: Vol. 1: Iss. 1, Article 6.

DOI: 10.7454/jp.v1i1.1103

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss1/6>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

R E S E N S I

Partai dan Patron: Riwayat PSII Melalui Gejolak Zaman

CAROLUS BREGAS PRANOTO*

UI Liberalism and Democracy Study Club

Email: cbregaspranoto@outlook.co.id

Subekti, Valina Singka. 2014. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Xxii + 235 halaman.

Pemilu 2014 yang lalu meninggalkan salah satu masalah yang masih menghantui dua partai politik: perpecahan internal. Dua partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). PPP terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Suryadharma Ali dan kubu Muhammad Romahurmuziy. Sementara itu, Partai Golkar terpecah menjadi dua, yaitu kubu Munas Ancol, yang diketuai oleh Agung Laksono, dan kubu Munas Bali, yang diketuai oleh Aburizal Bakrie. Dalam kedua kasus tersebut, kita bisa melihat tidak hanya adanya pergolakan di internal partai politik saja, tetapi juga konstelasi politik nasional pasca-pemilu yang mempertajam konflik tersebut. Kondisi tersebut di atas tidak hanya menunjukkan keretakan hubungan antara elit dalam partai politik, tetapi juga bagaimana kedua pihak yang berkonflik kemudian didukung oleh anggota partai politik, yang ikut terpecah pula.

Salah satu penjelasan utama dalam memahami perpecahan tersebut di atas bisa kita temukan dengan melihat segi kelembagaan dari partai-partai politik yang ada. Masalah seperti tidak adanya peraturan yang ketat dan kerancuan wewenang antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menyebabkan kinerja internal partai menjadi tidak ideal dan tumpang tindih. Dengan demikian, partai politik harus mereformasi lembaga-lembaga tersebut agar partai politik bisa bekerja secara pro-

* Pegiat di UI Liberalism and Democracy Study Club.

fesional. Namun menggunakan pendekatan kelembagaan seperti itu meluputkan dua hal yang juga harus dilihat: peran aktor dalam partai dan pengaruh keadaan politik nasional. Berbagai upaya pelebagaan partai politik akan mengalami kesulitan tanpa bisa memperhitungkan kedua masalah tersebut, terlebih lagi bila partai politik itu sudah mengalami keretakan sejak lama.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa persaingan itu bisa terjadi cukup lama? Begitupun juga mengapa anggota partai politik bisa terpecah untuk mendukung salah satu elit? Nampaknya penjelasan sepihak untuk melihat pengaruh keadaan politik saja tidak cukup. Ancaman terbesar yang bisa terjadi pada partai politik bukanlah kurangnya pelebagaan partai itu sendiri, tetapi bagaimana partai politik sebagai lembaga memudahkan fragmentasi internal yang disponsori oleh elit-elit partai untuk mendapatkan kekuasaan. Masalah pelebagaan yang berujung pada fragmentasi elit partai sudah menjadi salah satu penyebab utama retaknya partai politik—sesuatu yang juga menyebabkan mengapa banyak partai politik di Indonesia sering tidak mendapat kepercayaan dari konstituennya di masyarakat. Ada dua hasil dari ada dan tidak adanya pelebagaan sistem dalam sebuah partai politik. Pelebagaan sistem dalam partai politik yang baik akan memunculkan akar yang kuat pada masyarakat dan hubungan antara pemilih-partai menjadi erat. Pelebagaan itu juga tidak akan terikat pada kepemimpinan tokoh berwibawa yang bisa berdiri sendiri dengan statusnya yang mandiri. Sebaliknya, pelebagaan yang buruk menyebabkan ketidakpastian elektoral dan akuntabilitas. Kepemimpinan partai pun akan sering didominasi oleh tokoh berwibawa (Mainwaring dan Torcal dalam Ufen 2006, 206-207).¹ Perpecahan internal partai politik oleh elit merupakan suatu gejala politik yang terjadi di berbagai partai politik di Indonesia, baik partai politik yang bernafaskan agama maupun yang sekuler.² Maka tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa masalah

1 Mainwaring dan Torcal tidak memberikan definisi jelas saat mengatakan “pelebagaan sistem partai”; apakah pelebagaan organisasi partai itu sendiri, ataukah sistem pemerintahan dengan banyak partai?

2 Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah pecahnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1990-an. Kubu Megawati dan Kubu Suryadi bersaing untuk menguasai PDI, yang

pelembagaan partai dan konsekuensinya adalah masalah besar dalam berbagai partai politik di Indonesia.

Buku "*Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit*" muncul untuk mencoba memberikan jawaban terkait uraian di atas. Meskipun buku ini jatuh ke dalam kajian sejarah-politik, kasus yang diangkat dalam buku ini sangatlah relevan dengan pembahasan masalah pelembagaan dan fragmentasi partai. Dengan memilih PSII sebagai kasusnya, penulis buku memberikan analisis faktor-faktor internal maupun eksternal partai politik yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Penekanannya tidak hanya pada masalah keadaan, tetapi juga melihat bagaimana elit partai politik memiliki daya tawar yang terlampau besar. Dengan memanfaatkan kelembagaan partai yang lemah, serta modal kekuasaan yang ada, pengaruh para elit itu menjadi semakin besar sehingga ia tidak bisa diawasi sembari juga melakukan usaha agar klien-klien di dalam partai itu hanya menikmati sedikit kekuasaan. Di sini, elit partai tidak hanya dilihat sekedar sebagai anggota partai, tetapi juga merupakan patron yang kuat.

TEKANAN PADA PARTAI DAN POLARISASI KONFLIK OLEH PATRON

Di mana letak permasalahan yang menyebabkan perpecahan PSII? Temuan penulis buku bisa dijelaskan ke dalam tiga faktor, yaitu (1) kaderisasi; (2) pengaruh rezim yang berkuasa; dan (3) pengaruh kelompok Islam yang ada di masyarakat. Pertama, masalah kaderisasi dan pelembagaan politik memiliki pengaruh besar. Pasca kemerdekaan, PSII kesulitan menemukan kader-kader baru karena vakumnya kegiatan di bawah pemerintahan Jepang dan penjajahan setelah itu. Pemilihan umum tahun 1971 merupakan perwujudan dari kegagalan kaderisasi PSII. Oleh karena kurangnya kader yang ada, kurangnya kader di kepengurusan PSII di tingkat bawah, dan minimnya pendanaan kampanye yang berasal dari iuran anggota menyebabkan partai

berujung kepada munculnya Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh kubu pertama dan Partai Demokrasi Indonesia-Marhaen (PDI-Marhaen) yang dipimpin oleh kubu kedua.

tersebut tidak bisa berkampanye secara maksimal. Perlahan, PSII kehilangan kadernya karena beralih ke partai Islam lainnya seperti Perti dan NU. Kebutuhan akan kader yang banyak untuk mempertahankan partai membuat PSII harus melangkahi sistem kaderisasinya yang sudah dibangun semenjak lama. Peraturan seperti masa percobaan 6 bulan sebelum *bai'at* (sumpah kepada ideologi), menjalankan syariat Islam, dan menjalani kaderisasi melalui organisasi partai dilewati. Partai harus membuka jalan pintas dengan membuka kesempatan bagi banyak orang-orang muda untuk mengisi kedudukan di partai, terlebih lagi untuk memenuhi jabatan baik di Dewan Partai (DP) maupun di Lajnah Tanfidziah (LT) (hlm. 82). Di sinilah Gobel dan Barlianta, serta Bustaman, Gani, Zubaidach Muchtar dan Muchtar Ali muncul sebagai pengurus-pengurus baru PSII. Kelompok Gobel dan Barlianta memimpin kubu Pragmatis, sedangkan Bustaman dan yang lainnya memimpin kubu Idealis. Yang pertama menguasai DP, sedangkan yang kedua menguasai LT.

Kedua, konflik PSII mencuat pada awal kekuasaan Orde Baru. Dengan sangat memperhatikan konsep “tertib politik” dari Samuel P. Huntington, rezim ini melihat bahwa kerusuhan atau kekacauan politik hanya akan menjadi penghalang dari pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu muncul kebijakan pemerintah untuk memiliki kendali ketat terhadap partai politik yang dianggap sebagai permasalahan dari ketidakstabilan politik. Muncul kebijakan restrukturisasi partai, yang kemudian kita kenal sebagai “fusi partai”³Pelaksanaan kebijakan ini dijalankan juga melalui intervensi yang tergolong mendalam terhadap keadaan internal partai. Selain itu, rezim juga sangat mendukung kader atau tokoh partai yang mendukung kebijakan pembangunan dan ekonomi (hlm.83). Suasana partai nasional seperti ini tidak memberikan banyak ruang gerak bagi partai selain untuk menyesuaikan kebijakan mereka.

Ketiga, PSII sendiri juga menghadapi masalah untuk bisa tetap bertahan dalam keberagaman kelompok Islam yang ada di Indonesia.

3 Soeharto memberikan sinyal yang sangat kuat perihal kebijakan ini dengan mengikuti kongres-kongres tiap partai besar yang ada dan menyampaikan pidato yang mempromosikannya.

Secara tradisional, PSII tidak memihak kepada satu kelompok Islam manapun. Partai itu membuka diri seluas-luasnya baik kepada kelompok modernis (Muhammadiyah) maupun tradisional (NU) (hlm. 54). Sekilas, siasat politik ini mampu memberikan PSII ruang gerak yang banyak kepada umat Islam yang masuk ke dalam salah satu kelompok yang ada di atas. Tetapi, pada kenyataannya PSII tidak mampu untuk bisa mengikat salah satu kelompok untuk menjadi pendukung setianya sehingga mereka bisa dengan mudah ditinggalkan-persis dengan apa yang terjadi pada tahun 1971. Selain itu, keragaman organisasi Islam lain seperti HMI, PII, dan Masyumi juga memecah kader. Dengan ketiga penjelasan ini, temuan penulis buku menunjukkan bahwa masalah pelembagaan partai bukan hanya perkara kelembagaan partai itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel lain di mana partai politik itu berada.

Selanjutnya, masalah elit-elit yang menjadi patron dari klien-klienya di dalam partai. Seperti apa yang sudah dijabarkan oleh Mainwaring dan Torcal di atas, di sisi kepemimpinan, pelembagaan yang baik tidak hanya menghasilkan hubungan partai politik dan konstituen yang erat dan tidak berkuasanya kekuatan tokoh-tokoh berwibawa, tetapi juga membuat adanya polarisasi moderat (Mainwaring dan Torcal dalam Ufen 2006, 6). Hal ini menciptakan berjalannya sistem partai politik dengan stabil. Pada kasus PSII, para elit partai yang berseteru tidak hanya memanfaatkan kegamangan wewenang antara DP dan LT, tetapi juga dengan memanfaatkan sosok patron besar dalam partai: Anwar Tjokroaminoto.

Untuk menganalisis hal ini, penulis buku mengembangkan konsep hubungan patron-klien James C. Scott dari yang menguasai kekuatan ekonomi semata menjadi empat modal kekuasaan sentripetal patron untuk berkuasa atas kliennya. Keempat modal kekuasaan tersebut adalah penghormatan tradisional, penghormatan kapasitas, kekuasaan materi, dan kepatuhan struktural (hlm.25). Melalui konsep ini, penulis buku melihat bahwa baik kubu Idealis maupun kubu Pragmatis merupakan kelompok patron dalam PSII. Kubu Idealis memiliki kepentingan untuk menegakkan Program Asas dan Tandhim Partai ke dalam ideologi par-

tai. Sebaliknya, dengan latar belakang Gobel sebagai pedagang, kubu Pragmatis memiliki kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedekatan dengan birokrasi pemerintahan.

Perbedaan kepentingan dari kedua kubu pemuda ini dimanfaatkan oleh Anwar Tjokroaminoto. Anwar melihat bahwa agar PSII bertahan di bawah tekanan-tekanan yang ada, partai itu harus disokong oleh pendanaan yang kuat. Dengan menggunakan modal penghormatan tradisional, PSII Anwar sebagai "trah" Tjokroaminoto memberikan dukungannya kepada kubu Pragmatis untuk mendapatkan dana. Selain itu, Anwar juga membutuhkan modal materi untuk menggeser Arudji Kartawinata sebagai kepala LT (hlm.115). Kubu Pragmatis melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mencapai tujuannya, sehingga mereka menikmati perlindungan nama pendiri Syarikat Islam (SI) tersebut. Di sisi lain, kubu Idealis juga dirangkul oleh Anwar karena kemampuannya untuk tetap menjadi kader ideologis yang berpengaruh di partai (hlm.135). Alhasil, kedua kaum muda ini menjadi setara di bawah nama Tjokroaminoto. Namun keadaan ini tidak bertahan lama karena Tjokroaminoto akhirnya lebih mendukung kubu Pragmatis. Perkembangan yang ada menyebabkan kubu Idealis untuk memutuskan hubungannya dengan Tjokroaminoto dan berusaha untuk menguasai partai pada Majelis Taklim ke-33. Dalam proses ini, baik kalangan pemuda maupun kalangan orang tua partai yang sebelumnya tidak begitu terlibat akhirnya terpolarisasi⁴ dan membelah partai di bawah kendali kedua kubu tersebut (MacAdam, Tarrow, Tilly 2004, 321).

Pada bagian inilah terletak kontribusi terbesar buku ini. Dikarenakan adanya unsur patronase yang sudah kuat dalam tubuh partai, sangat sulit untuk melakukan konsolidasi internal. Bila hal ini tidak diperhatikan, maka kemungkinan yang terjadi adalah ketergantungan partai politik dengan sosok tokoh berwibawa, menyulitkan diri mereka

4 Penulis meminjam istilah ini dari pemahaman polarisasi Doug MacAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly sebagai satu dari lima proses menuju kekerasan dalam politik perseteruan (*contentious politics*). Polarisasi diartikan sebagai "peluasan ruang politik dan sosial antara para pendaku dalam suatu episode perseteruan dan ditariknya aktor-aktor yang sebelumnya tidak terlibat atau moderat menuju kutub yang satu, atau yang lainnya, atau yang saling bertolak belakang".

sendiri untuk membangun sistem yang bisa menjaga stabilitas internal partai bila tokoh tersebut harus digantikan (Noor 2012, 168-219).⁵ Pengalaman PSII di sini juga memberikan gambaran bagaimana keadaan sosial juga mempengaruhi naik-turunnya suatu partai politik saat berhadapan dengan konflik internal. Ketidakmampuan bagi PSII untuk melakukan pembaharuan juga dipengaruhi oleh bagaimana NU dan Muhammadiyah bisa eksis sebagai kekuatan sosial dalam masyarakat Indonesia. Temuan ini bisa membuka segi-segi baru dalam kajian partai politik, khususnya hubungan antara partai politik dengan berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat (Hadiz 2012; Qodir 2013).

PENUTUP

Semenjak PSII menyetujui fusi partai, keunikannya sebagai penerus gerakan SI hilang ditelan oleh perubahan politik yang ada. Saat ini Indonesia sudah dihiasi kembali oleh berbagai partai Islam lainnya seperti PKS yang bisa dikatakan cukup sukses untuk bertahan dalam keadaan politik saat ini. Tanpa kita sadari, penerus pelopor gerakan nasionalisme Indonesia ini sudah tidak pernah terdengar lagi selain di diskusi-diskusi atau buku-buku sejarah. Pelajaran lainnya yang bisa dipetik dari pengalaman PSII adalah: konflik internal yang tidak pernah diselesaikan hanya akan membuat partai tersebut menjadi semakin lemah, mudah diterjang oleh perubahan politik, dan ditelan oleh sejarah. Partai politik, baik yang Islam maupun bukan, akhirnya harus selalu mengingat ini bila tidak ingin berakhir seperti PSII.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiz, Vedi R. 2012. "Tanpa 'Manisan' Turki: Kebuntuan Politik Partai Islam di Indonesia", *Prisma* 31, (No.1).
- Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal, "Party System Institutionalization and Party System Theory after Third Wave of Democratization", dalam Richard Katz s. dan Wilson Crotty (eds.), *Handbook of Party Politics*, (New Delhi: Sage, 2006), hlm. 206-207 sebagaimana

⁵ Pelembagaan partai juga memiliki unsur resolusi konflik. Tanpa memiliki sistem yang jelas seperti ini juga, maka konflik internal akan cenderung menyebabkan perpecahan partai.

- dikutip oleh Ufen, Andreas, 2007, "Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, the Philippines, and Thailand", http://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp44_ufen.pdf (Diakses 19 Juli 2015).
- McAdam, D., Sidney Tarrow, dan Charles Tilly. 2004. *Dynamics of Contention*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Noor, Firman. 2012. "Institutionalising Islamic political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)" Ph.D diss. Exeter University.
- Qodir, Zuly. 2013. "Revitalisasi Gerakan Masyarakat Sipil: Kasus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", *Prisma* 32, (No. 4).